

ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MALANG DALAM SOSIALISASI MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2015

Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email: Metiba_h@yahoo.co.id

Abstract: *The phenomenon of local elections (elections) that occurred in the State of Indonesia is quite the talk of the community. The idea of the election of Regional Head has gained a place in the public discourse Indonesia. It is necessary to increase the performance of which is oriented to the National Election Commission in the achievement of results and accountability based on the values of accountability towards good governance namely to achieve simultaneous elections were in line with expectations. The purpose of this research are: 1) want to know the performance of Malang Regency Election 2015 on Unison, 2) wants to know and to describe the factors supporting and simultaneous elections in 2015 in Malang Regency. With hope this study can be useful for the community, and who are struggling to meet the demands of the State apparatus. In this study used qualitative methods using the steps of collecting data through observation, interviews, and documentation. Furthermore, to analyze data using interactive data analysis model developed by Sugiyono which includes the process of data reduction, data presentation, and conclusion. From the research that has been done obtained a conclusion; 1) The performance is conducted Malang Regency in the face of the local elections in 2015 have run simultaneously with optimal; 2) inhibiting factors the Commission in dealing with simultaneous local elections in 2015; 3) Factors supporting the Commission in dealing with simultaneous local elections in 2015.*

Keywords: *Performance, Election Commission, Elections Unison.*

Abstrak: Fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terjadi di Negara Indonesia cukup menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Gagasan tentang pemilihan Kepala Daerah semakin mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Maka diperlukan peningkatan kinerja yang berorientasi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai pemilihan serentak yang sesuai dengan harapan. Adapun tujuan peneliti ini adalah: 1) ingin mengetahui kinerja KPU Kabupaten Malang Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak, 2) ingin mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Pilkada serentak Tahun 2015 di KPU Kabupaten Malang. Dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan yang berjuang untuk memenuhi tuntutan aparaturnya Negara. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang menggunakan langkah-langkah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya untuk menganalisa data menggunakan model analisa data interaktif yang dikembangkan oleh Sugiyono yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh suatu kesimpulan; 1) Kinerja yang dilakukan KPU Kabupaten Malang dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 telah berjalan dengan optimal; 2) Faktor penghambat KPU dalam menghadapi pilkada serentak Tahun 2015; 3) Faktor pendukung KPU dalam menghadapi pilkada serentak Tahun 2015.

Kata Kunci: Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, Pilkada Serentak.

PENDAHULUAN

Fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terjadi di Indonesia cukup menjadi bahan pembicaraan tengah masyarakat. Gagasan tentang Pilkada semakin mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan yang banyak

terhadap sistem nilai dan kebijakan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum ini diatur dalam pasal 8 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai garda terdepan dalam sebuah negara.

Kepala Daerah hanya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pengisian jabatan Kepala Daerah sebelum tahun 2005, pemerintahan Daerah dilakukan dengan cara pemilihan secara perwakilan, yaitu dipilih oleh wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Selanjutnya, Dalam pilkada serentak ini perlu banyak persiapan matang khususnya bagi KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sebagai penyelenggara pilkada dari mulai kesiapan kinerja, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Kewas (2013:9) dalam Penelitiannya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum masih kurangnya sosialisasi dengan pihak-pihak terkait baik daerah maupun Kabupaten dan juga tokoh-tokoh masyarakat serta pers perlu senantiasa dilakukan.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja komisi pemilihan umum dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015, mulai dari perencanaan, anggaran yang dibutuhkan dan pelaksanaan maka dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

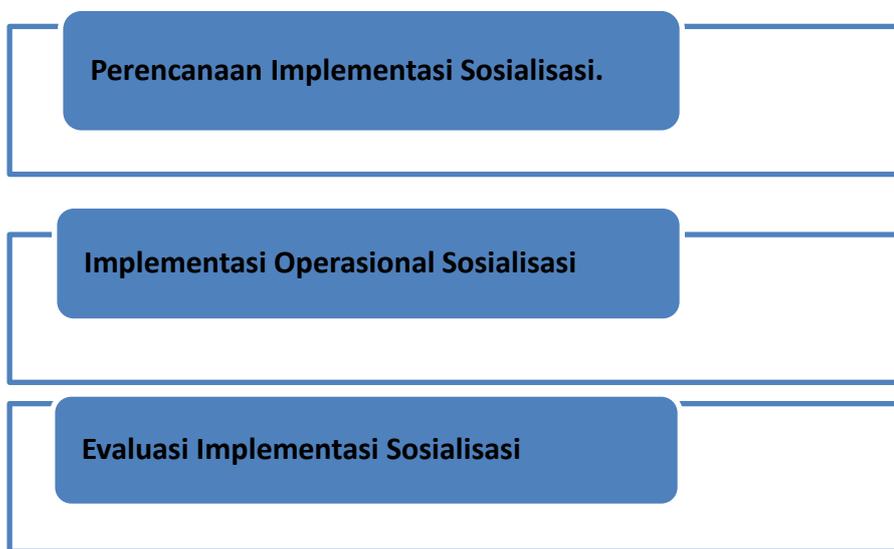
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini berusaha menelaah fenomena sosial. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai KPU Kabupaten Malang dan masyarakat Kabupaten Malang. Jenis data yang digunakan yaitu data yang berbentuk kata-kata dan tulisan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan Data sekunder ini berupa dokumen, arsip, catatan resmi, hasil seminar, karya tulis, majalah, maupun data-data pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasi dianalisis melalui reduksi data yang didapat, selanjutnya data tersebut dipilah, untuk disajikan kemudian ditarik kesimpulan atas jawaban yang telah didapatkan dari informan. Adapun dalam menentukan Kualitas keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya dan juga dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Implementasi Sosialisasi.

Dalam pandangan KPU Kabupaten Malang selama ini, proses Pilkada serentak sudah secara ideal dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perencanaan ini dilakukan pada semua tahapan pemilihan serentak yang meliputi tahap penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap), penetapan DPT, pelaksanaan pedistribusian kepada panitia pemilihan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan tahap akhir yaitu pertanggung jawaban PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pilkada serentak. Dengan tujuan agar produktif/hasil terlaksana secara efektif.

Bagan 1. Analisis KPU Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi yang di Lakukan



Implementasi Operasional Sosialisasi

Keuntungan utama mengimplementasikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah KPU Kabupaten Malang. Informasi terkait KPU Kabupaten Malang sudah dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Seperti informasi Pilkada serentak dapat diakses dengan mudah melalui *website* yang dimiliki KPU Kabupaten Malang.

Evaluasi Implementasi Sosialisasi

Kinerja KPU Kabupaten Malang sudah menunjukkan kemampuan untuk mengenali program-program yang ada dalam, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program – program dalam diskusi.KPU Kabupaten Malang menangkap kebutuhan dan mengimplementasikan program sesuai hasil forum bersama masyarakat, menangkap kebutuhan masyarakat oleh KPU Kabupaten Malang adalah saat masa pra Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 dan masa penyelesaian. Secara singkat Evaluasi disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan program dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Faktor pendukung dalam menghadapi Pilkada serentak Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang

Terdapat beberapa faktor pendukung KPU Kabupaten Malang dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah serentak dalam menjalankan kinerja-kinerjanya.Faktor-faktor pendukung tersebut adalah individu, peraturan, dan media. Faktor penghambat dalam menghadapi Pilkada serentak Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang

Segala sesuatu tidaklah semulus yang direncanakan, dalam menjalankan kinerjanya, KPU Kabupaten Malang juga menghadapi kendala dan hambatan. Kendala serta hambatan ini disebut sebagai faktor penghambat. Adapun faktor penghambat yang dimaksud adalah hambatan struktural beberapa regulasi, berupa dana/anggaran dan SDM (Sumber daya Manusia).

KESIMPULAN

1. Kinerja yang dilakukan KPU Kabupaten Malang dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 telah berjalan dengan optimal baik dari perumusan kebijakan maupun dalam implementasi pemilihan Kepala Daerah tersebut.
2. Faktor penghambat KPU dalam menghadapi pilkada serentak adalah SDM (Sumber Daya Manusia) ini dikarenakan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu masih terbatasnya jumlah pegawai yang dimiliki dan juga masih minimnya dana yang didistribusikan kepada KPU Kabupaten Malang. Sedangkan faktor pendukung yaitu personal/individu, media serta peraturan/kebijakan KPU Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Luming, Kewas, dkk 2013. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Legislatif Studi di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004*, tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015*, tentang pemilihan Kepala Daerah serentak
- Undang-undang Dasar Pasal 18 Tahun 1945, tentang penyelenggara Daerah.